

## Pengembangan Agraria dan Teknologi Bidang Pertanian: Perspektif Sosiologis dan Antropologis

Andria Gustiawan Perangin-angin

<sup>1</sup>Program Studi Pascasarjana Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia  
andria.gustiawan@ui.ac.id

### Abstract

Agriculture in Indonesia is experiencing uncertainty because of the uneven use of agricultural technology. On the other hand, farmers are trapped in poverty because of limited land ownership, capital and technology. Indonesian farmers do not get certainty concerning crop by-products due to limited land, small production yields due to inadequate technology and very volatile market prices for agricultural production. This study aims to explore the reasons for the delay in the development of the agricultural sector in Indonesia and its relation to agricultural politics. The research method used in this research is descriptive qualitative. This research found that the complexity of agricultural problems that occur in Indonesia is not only due to the lack of development in agricultural technology, but also caused by the lack of agricultural land that can be utilized by farmers.

Keywords: agrarian, small farming, socio-technology, agricultural economics

### Abstrak

Pertanian di Indonesia mengalami kegamangan karena penggunaan teknologi pertanian yang tidak merata. Di sisi lain, petani terjebak dalam kemiskinan karena keterbatasan kepemilikan lahan, modal dan teknologi. Petani Indonesia tidak mendapat kepastian hasil panen yang disebabkan oleh sempitnya lahan, kecilnya hasil produksi karena teknologi tidak mumpuni dan harga pasar produksi pertanian yang sangat fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri alasan terhambatnya perkembangan di sektor pertanian di Indonesia dan kaitannya dengan politik pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pertanian yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi akibat minimnya perkembangan teknologi pertanian, tetapi disebabkan juga oleh minimnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh para petani.

Kata kunci: agraria, *small farming*, sosio-teknologi, ekonomi pertanian

### Pendahuluan

Salah satu persoalan rumit di Indonesia adalah bidang pertanian yang tidak mengalami perkembangan teknologi, modal, manajemen tanam, distribusi dan pasar, ditambah adanya konflik tanah. Teknologi pertanian di Indonesia sepertinya mengalami kemajuan semu

karena seolah-olah sudah mendapat sentuhan teknologi<sup>1</sup>. Faktanya, sebagian besar pertanian di Indonesia masih menggunakan peralatan tradisional yang dari generasi ke generasi masih sama, misalnya cangkul. Kemajuan pertanian tidak hanya dilihat dari perkembangan teknologi yang digunakan, melainkan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi ketersediaan lahan untuk petani, teknologi, modal, dan pasar yang sehat bagi produksi pertanian. Perkembangan kemajuan pertanian termasuk inovasi ini tergantung dari arah kebijakan pemerintah (Habtewold, 2021).

Petani Indonesia masih bersifat subsisten atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Levelnya belum sampai pada bisnis pertanian yang menjadikan profesi petani sangat prestise (Maftuchin, 2017). Kondisi ini tidak terlepas dari modal yang mereka miliki sangat minim sehingga tidak dapat mengembangkan potensi pertanian secara maksimal. Para petani biasanya bekerjasama dengan para bandar pertanian yang mempunyai modal untuk dipinjamkan. Sebagai bagian dari mekanisme pembayaran pinjaman modal, hasil pertanian mereka dijual kepada bandar dengan harga yang ditentukan oleh bandar. Sistem ini sering juga disebut sebagai “ijon” pertanian (Danari, 2016; Latifa, 2022).

Manajemen tanam yang buruk menyebabkan terjadinya fluktuasi ketersediaan barang dan harga. Satu komoditas pertanian dapat dipanen dari berbagai wilayah dalam waktu bersamaan sehingga harganya sangat anjlok. Di sisi lain, pada waktu tertentu harga hasil panen dapat melambung tinggi karena komoditasnya kurang di pasar<sup>2</sup>. Biasanya untuk menangani kondisi ini, pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengimpor hasil pertanian. Di sisi

lain, para pelaku pasar sering melakukan spekulasi komoditas dengan menimbun barang di gudang. Tujuannya untuk menciptakan kelangkaan barang sehingga harga menjadi mahal. Di Indonesia, istilah ini disebut sebagai “tengkulak” (Hendriyanto, 2020).

Konflik tanah sepertinya sudah menjadi titik krusial yang belum mendapat prioritas dari rezim ke rezim. Petani gurem dan buruh tani merupakan cerminan kemiskinan dalam sektor pertanian. Lahan-lahan sempit milik petani mulai tergusur oleh pertanian skala besar dalam bentuk perkebunan maupun industri ekstraktif. Investasi skala besar yang menghabiskan banyak lahan bertentangan dengan konsep agraria Indonesia yang mengefektifkan pertanian skala kecil. Tidak heran konflik agraria yang diwarnai dengan kekerasan dan kriminalisasi selalu terjadi di seluruh pelosok tanah air (Chandra, 2013; Saputra, 2018).

Semua isu tersebut menjadi satu konsep yang disebut reforma agraria, yaitu terdiri dari perombakan struktur pemanfaatan dan kepemilikan tanah, teknologi, modal dan pasar yang sehat untuk hasil tani. Sistem pertanian kecil yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang diturunkan menjadi UU No.56/PRP/1961<sup>3</sup> tentang *Landereform* luas lahan pertanian, menjamin tanah setidaknya 2 ha kepada keluarga petani. Apabila tanah sudah diberikan kepada petani sesuai UU *Landreform* maka pemerintah wajib memberikan teknologi, modal dan jaminan pasar yang sehat untuk hasil tani kepada petani.

Teknologi pertanian dan jenis tanaman menjadi krusial mengingat letak geografi di Indonesia tidak sama di setiap daerah. Modal yang diberikan kepada petani dapat menghapus sistem ijon yang cenderung merugikan petani.

<sup>1</sup> Publikasi detik.com mengenai demonstrasi teknologi pertanian di Ponorogo, Jawa Timur menjadi bukti bahwa sektor pertanian dalam kacamata pemerintah hanya sebagai serimonial karena mesin yang dibawa hanya bentuk pencitraan, tidak langsung dibagikan kepada petani (Sugiharto, 2015).

<sup>2</sup> Menurut Kepala Staf Presiden, Bapak Moeldoko tidak stabilnya harga karena permintaan dan penawaran tidak dikelola dengan baik. Pada masa tertentu panen komoditas pertanian mengalami penurunan harga karena terjadi over produksi di pasar. Selain itu, menurut Moeldoko Dinas terkait tidak pernah tegas untuk mengelola permintaan dan penawaran sehingga sering terjadi over produksi pertanian (Taher, 2020).

<sup>3</sup> Diundangkan pada 19 Desember 1960 dan 29 Desember 1960 ditetapkan menjadi UU. Perpu No.56 tentang Luas Lahan Pertanian mulai berlaku sejak 1 Januari 1960 sebagai UU.

Petani mampu membeli alat pertanian dengan modal yang cukup sehingga hasil pertanian dapat maksimal. Aspek terakhir dari reformasi agrarian adalah pembentukan pasar yang sehat, misalnya ada ambang batas bawah dan atas bagi setiap komoditas sehingga harga jual produksi pertanian memberikan keuntungan bagi petani (Gandi et al., 2017).

Tahapan reformasi agraria merupakan bagian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akar persoalan pertanian harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Sektor pertanian di Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain karena pemerintah tidak pernah serius membangun dunia pertanian. Sebagai perbandingan, Jepang sudah menggunakan pertanian mekanisasi mulai dari penanaman, perawatan, panen dan *threatment* pasca panen. Sementara pertanian di Indonesia masih manual di hampir semua tahapan. Misalnya dalam pemompaan fungsida lahan pertanian, di Jepang sudah menggunakan drone, sedangkan Indonesia masih menggunakan pompa fungsida yang digendong. Pertanyaan mendasar adalah kenapa pertanian Indonesia tidak pernah maju? Pertanyaan ini akan menyorot kebijakan pemerintah yang akan menjadi agenda politik pertanian Indonesia dan sikap mental masyarakat Indonesia yang selalu menyuarakan masyarakat agraris.

### Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai agraria cenderung melihat perebutan akses terhadap tanah antara masyarakat dengan korporasi yang mendapat dukungan dari negara. Program redistribusi tanah yang memberikan lahan sempit kepada petani atau penggarap belum terlalu banyak.

Fokus kajian masih berkuat pada mobilisasi untuk menguasai tanah, seperti petani sehingga kajian lebih memperlihatkan konflik agraria. Christodoulou menyampaikan bahwa reformasi agraria adalah anak kandung dari konflik agraria karena menyangkut perombakan struktur kepemilikan tanah (Wiradi, 2009). Hal ini yang menyebabkan banyak ilmuwan

maupun peneliti agraria mengkaji berbagai macam konflik yang terjadi di tanah air.

Tulisan yang menarik dari Fauzi (2021) yang mengulas teori akses, properti dan eksklusivitas dari Ribot, Peluso dan Hall. Di dalam ulasannya, Fauzi (2021) menyinggung keterkaitan antara politik dengan sumber daya agraria. Biaya politik yang cukup tinggi menimbulkan jejaring antara politisi dan pengusaha. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat reformasi agraria semakin rumit karena keterpihakan politisi kepada suatu golongan.

Kajian mengenai agrarian yang masih kurang adalah teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga ada peningkatan ekonomi petani. Konsep reformasi agraria yang terdiri dari perombakan struktur kepemilikan tanah, modal, teknologi dan pasar sehat untuk produksi pertanian, hampir melupakan teknologi pertanian. Lahan-lahan kecil milik petani sangat mudah dikonversi karena pertambahan ekonomi dari tanah tidak signifikan akibat dari teknologi yang mandek. Penelitian konflik agraria lebih menarik karena ada unsur heriosme dari perjuangan dan memang masalah utama dari keempat hal tersebut adalah jaminan hak atas tanah.

Program redistribusi tanah sudah berjalan sejak 2004, sehingga perlu ada perhatian terhadap teknologi untuk meningkatkan produksi lahan sempit. Tentu ini membutuhkan satu kebijakan khusus yang berfokus mengembangkan teknologi pertanian dan peningkatan ekonomi rumah tangga petani.

Tidak dapat dipungkiri bahwa urusan agraria adalah urusan politik. Artinya selama pemegang kekuasaan tidak memiliki keinginan kuat untuk menjalankan reformasi agrarian, maka yang terjadi adalah tambal sulam untuk meredakan konflik agraria. Oleh karena itu, organisasi dan tokoh yang kuat untuk memimpin pelaksanaan agenda reformasi agraria diperlukan. Pada masa Orde Lama, agenda reformasi agraria langsung dipimpin Soekarno dalam bentuk program *landreform*. Program

ini tidak pernah berjalan karena peristiwa 65<sup>3</sup>, hanya saja menyelesaikan UUPA N0.5/1960.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif desain etnografi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, FGD dan seminar nasional mengenai perkembangan agraria serta literatur dan perbandingan ekonomi pertanian dengan negara yang lebih maju.

Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan ketika berkunjung ke basis tani yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Batang, Jawa Tengah, dan Blitar Jawa Timur untuk melihat luas garapan petani dan teknologi pertanian.

## Hasil dan Pembahasan

### Mengurai Problematika Agraria dan Pertanian Indonesia

Di dalam pertanian Indonesia, terdapat empat permasalahan utama. *Pertama* adalah persoalan alas hak atas tanah. Sebagai negara bercorak agraris, Indonesia memiliki konsep *small farming* dengan luasan 2-7,5 hektar setiap kepala keluarga petani. Setiap keluarga petani, baik ayah atau ibu maupun keduanya yang memiliki mata pencaharian atau profesi sebagai petani, berhak mendapatkan tanah seluas minimum 2 hektar (Ginting, 2019; Pradhani, 2019). Sampai hari ini, jaminan hak atas tanah memang belum pernah terealisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), jumlah petani gurem di Indonesia sebesar 15.809.398 KK. Faktor lain yang menyebabkan lestarnya petani gurem adalah ketidaktegasan pemerintah dari periode ke periode mengenai penetapan lahan pertanian untuk petani kecil. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur ada 35 perusahaan sawit yang tidak mengantongi HGU pada tahun 2010, tetapi tidak pernah mendapat sanksi atau keterbukaan proses hukum terhadap perusahaan yang beroperasi (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2010). Apabila lahan tersebut diperuntukkan petani skala kecil sesuai dengan aturan UU Landreform,

<sup>4</sup> Bhima Yusdistira, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Fainace (INDEF), mengatakan bahwa dunia pertanian kita tidak maju karena petani Indonesia masih bersifat tradisional dan minimnya pelatihan teknologi pertanian (Sulaeman, 2020).

maka petani gurem akan bertransformasi menjadi *small farming*.

Di dalam pengelolaan pertanian skala kecil, maka tidak bisa terlepas dari teknologi untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian. Teknologi merupakan permasalahan kedua yang tidak pernah tuntas sampai hari ini. Teknologi pertanian di Indonesia mengalami kegamangan karena minimnya inovasi untuk kemajuan teknologi pertanian. Teknologi pertanian masih menggunakan teknologi lama, tetapi di sisi lain ingin dikombinasikan dengan teknologi modern. Kombinasi ini mengalami kegagalan karena cara konservatif dan teknologi lama serta modernisasi pertanian tidak memberikan hasil maksimal terhadap petani Indonesia secara merata<sup>4</sup>. Petani yang masih bercorak subsisten dengan teknologi lama dipaksa masuk ke dalam dunia modern pertanian. Hasilnya petani tidak mampu mengikuti perkembangan, bukan hanya karena kekurangan kemampuan dalam menggunakan teknologi, tetapi teknologi yang berbiaya tinggi menjadi kendala untuk dimiliki petani.

Gambaran kedua adalah apabila membandingkan teknologi dengan negara lain seperti Tiongkok dan Jepang yang notabene sama-sama membangun negara pada tahun 40-an, maka Indonesia sangat jauh ketinggalan. Teknologi pertanian di Tiongkok dan Jepang terpadu dan terintegrasi menjadikan ekonomi petani cukup baik. Sebagai contoh di Tiongkok, berdasarkan data Biro Pusat Statistik Tiongkok, pendapatan petani pada triwulan pertama 2022 sebesar 5.778 Yuan atau Rp 12.561.174, artinya penghasilan petani yang ada di China setiap bulannya adalah Rp 4.187.124. Petani di Jepang memiliki pendapatan berkisar Rp 15.000.000 – 27.000.000. Produktifitas petani di Jepang tentu lebih maksimal karena pertanian mereka sudah menggunakan sistem mekanik berbasis digitalisasi, melalui sistem perangkat lunak (komputerisasi). Pada era revolusi 4.0 yang terjadi sekarang, informasi begitu cepat menyebar. Informasi ini mela-

hirkan berbagai inovasi-inovasi baru disemua sektor, termasuk dunia pertanian (Febrianti *et al.*, 2021).

Modal merupakan hal penting yang harus dimiliki petani. Hal ini adalah persoalan ketiga yang dihadapi petani Indonesia. Petani gurem dengan modal sedikit, bahkan cenderung hanya untuk bertahan hidup, menyebabkan petani tidak bisa mengolah potensi lahan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Selain ketidakberdayaan untuk membeli teknologi, mereka juga tidak mampu membeli bibit dan pupuk, bahan yang sangat utama dalam dunia pertanian. Mereka mengatasi hal ini dengan meminjam modal kepada tengkulak yang pada akhirnya membelenggu mereka. Kementerian Pertanian memang telah mempunyai program untuk membantu petani, tetapi banyak petani kesulitan untuk mengaksesnya karena persyaratan rumit (Sirnawati & Syahyuti, 2018). Petani merasa lebih mudah mengakses tengkulak dari pada bank, karena tengkulak memberikan opsi kepada petani untuk membayar utang mereka pasca panen, sementara bank tidak menyediakan opsi tersebut.

Pada akhirnya sistem pinjam pada tengkulak ini melahirkan ijon secara natural karena hubungan simbiosis mutualisme antara kedua pihak, yaitu petani dan tengkulak. Melalui sistem ini, petani gurem tidak akan pernah menjadi makmur karena hasil panennya telah dibeli oleh tengkulak dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak itu sendiri. Petani tidak akan bisa berbuat lebih untuk menaikkan harga sesuai keinginan mereka. Jika harga hasil panen mereka pasca panen tidak cukup untuk membeli bibit dan pupuk atau hasil panen ini tidak dapat dimanajemen untuk modal menanam berikutnya, maka petani akan kembali meminjam pada tengkulak untuk modal menanam (Rusdiyana *et al.*, 2019).

Kondisi ijon perlu diperhatikan dan ditangani melalui kebijakan dari pemerintah untuk menstabilkan harga beli produk pertanian. Salah satu cara yang bisa pemerintah lakukan adalah menetapkan harga batas bawah dan batas atas harga beli produk pertanian. Tentu

hal ini memerlukan satu konsep yang konsisten untuk dijalankan misalnya dengan membentuk satu lembaga khusus atau kembali mengaktifkan koperasi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menyejahterakan anggotanya. Konsep ini tidak menutup ruang bagi para tengkulak, artinya tengkulak masih dapat beroperasi tetapi harus bersaing dengan lembaga bentukan pemerintah yang menangani produksi pertanian. Cara lain yang lebih ekstrem tetapi sangat berdampak pada masyarakat luas di luar pertanian adalah menetapkan harga beli komoditas pertanian dan harga jual komoditas pertanian di pasar. Hal ini dapat memberikan efek yang luar biasa kepada petani.

Persoalan pasar produksi pertanian adalah persoalan keempat yang dihadapi oleh petani di Indonesia. Harga yang tidak pernah pasti menjadikan kehidupan ekonomi petani tidak pernah bisa dikalkulasi secara pasti.

Apabila kita telaah dari keempat persoalan utama pertanian di Indonesia, maka persoalan utamanya terletak pada luas kepemilikan tanah petani. Luas lahan yang mereka miliki atau kuasai tidak cukup untuk meningkatkan ekonomi. Petani kesulitan bertahan hidup karena hanya dapat mengelola lahan di bawah 0,5 hektar/petani gurem (Susilowati dan Maulana, 2016).

Kompleksitas yang dialami oleh petani di Indonesia menyebabkan kondisi pertanian di Indonesia sulit berkembang. Pasar yang tidak pernah pasti untuk hasil produksi pertanian menjadikan mereka bertahan sebagai petani subsisten dan ini menjadi preseden yang buruk di mata masyarakat, bahwa petani merupakan profesi yang tidak menarik karena terjebak dalam kubangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS penduduk miskin desa lebih besar yaitu 13,1% dibandingkan kota 7,89%.

### **Membangun Politik Agraria dan Pertanian yang Modern**

Penggunaan teknologi tidak dapat dihindarkan karena keberadaannya dapat membantu mempermudah kehidupan manusia. Semakin kompleks teknologi suatu masyarakat maka

kehidupan ekonominya juga akan semakin kompleks. Di dalam sektor pertanian, kompleksitas ekonominya akan bergantung terhadap pengelolaan sumber kekayaan alam atau sumber agrariannya. Misalnya dalam masyarakat industri yang padat modal dan menggunakan teknologi canggih, maka eksploitasi kekayaan alam semakin cepat. Pembukaan kawasan hutan yang kekayaan kayunya dijual sebagai komoditi ekspor internasional, kemudian lahan yang terbuka dibuka menjadi perkebunan atau bila di bawah perut bumi ada sumber mineral maka industri ekstraktif akan beroperasi.

Sistem globalisasi pada masa sekarang ternyata mengklasifikasi negara di dunia, antara negara penghasil sumber agraria untuk dieksploitasi dan negara sumber modal dengan teknologi tinggi. Indonesia adalah contoh yang tepat menggambarkannya. Indonesia kurang mumpuni dari segi sumber daya modal dan teknologi tetapi memiliki kekayaan sumber daya agraria. Hal ini menarik perhatian dari investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor pertanian di Indonesia. Hampir di semua sektor kekayaan agraria dieksploitasi, baik tambang dan mineral, laut, minyak dan gas sampai dunia pertanian<sup>5</sup>. Alhasil adalah kerusakan alam yang luar biasa.

Jasanoff menjelaskan bahwa teknologi merupakan instrumental dan mekanis dalam mewujudkan sebuah visi, tetapi yang perlu dicatat adalah teknologi memiliki sifat yang bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilihat yang mutlak untuk melengkapi atau selalu memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan manusia (Jasanoff, 2006). Di satu sisi, teknologi memang sangat dibutuhkan untuk memudahkan kegiatan manusia tetapi di sisi lain memberikan efek yang negatif kepada peradaban manusia. Misalnya guna mendapatkan keuntungan ekonomi di bidang otomotif maka produk teknologi pertanian digenjut. Untuk menghasilkan produk seperti traktor maka eksploitasi tambang mulai beroperasi dan akhirnya mem-

berikan efek terhadap pertanian skala kecil. Para petani yang lahannya memiliki sumber kekayaan alam ekstraktif seperti tambang mengalami penggusuran. Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan agraria, ada 30 konflik agraria sepanjang tahun 2021. Selain itu, tentu saja terjadi kerusakan lingkungan yang sangat hebat.

Seperti yang dijelaskan oleh Timothy Morton mengenai “*dark ecology*”, bahwa sisi gelap dari teknologi adalah kerusakan lingkungan global tanpa ada rasa kesadaran dari manusia bahwa produksi teknologi terus-menerus telah menambah beratnya kerusakan alam global. Sebagai contoh Morton (2016) menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan pernah sadar bahwa mobil yang digunakan setiap pagi, agar sampai kantor telah menyumbang kerusakan alam melalui emisi karbon dikeluarkan mobil.

Kekurangan dalam dunia pertanian Indonesia ada dua, pertama tidak adanya desain politik yang jelas dan konsisten dari Pemerintah Indonesia setiap periode. Pertanian, khususnya *small farming* masih dalam urutan belakang, karena pemerintah Indonesia mengutamakan kepentingan investasi global yang lapar tanah. Pemerintah yang melakukan liberalisasi sumber kekayaan agraria demi mengejar ekonomi makro telah mengorbakan program *small farming*. Kondisinya semakin parah karena izin HGU terus dikeluarkan untuk perkebunan skala luas, termasuk pertambangan atau ekstraktif dan izin pengembangan properti. Satu-satunya cara adalah melakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah sesuai kehendak UUPA No.5/1960 dan turunannya UU *Landreform*. Semua tanah berlebih dan tanah terlantar ditata ulang peruntukannya sehingga agenda *small farming* seperti yang kita harapkan dapat maksimal.

Ambiguitas terus lahir dalam dunia pertanian di Indonesia yang dapat dilihat dari kebijakan mengenai pertanahan melalui sertifikasi dan redistribusi lahan pada masa SBY dan Joko-

<sup>5</sup> Pada masa Presiden SBY, supply chains global, Indonesia menjadi sasaran investor dalam bidang perkebunan dan industri ekstraktif melalui program MP3EI. Kepemimpinan Jokowi, MP3EI tidak dicabut dan melanjutkan berbagai program yang mangkrak pada masa Presiden SBY.

wi hari ini. Pada masa SBY, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* yang didukung oleh berbagai UU pro terhadap liberalisasi lahan. Misalnya UU Pertambangan, UU Pengadaan tanah, UU Perkebunan, UU Mineral dan Batu Bara, dan UU Migas. Di sisi lain SBY juga mengeluarkan sertifikat untuk petani yang berasal dari eks HGU di Jawa Bagian Selatan dan Pesisir Utara. Rata-rata luasnya di bawah 2 hektar yang sangat jauh dari konsep *small farming*. Namun, kita dapat melihat politik pencitraan SBY, seolah-olah peduli terhadap petani dan dunia pertanian Indonesia melalui penataan tanah. Faktanya desain pertanian tersebut hampir tidak ada karena pada masa SBY pertanian di Indonesia tidak mengalami perkembangan teknologi. Alih-alih berharap untuk perkembangan teknologi, persoalan tanah semakin runyam. Masuknya investor baru yang melahap lahan pertanian dan pemukiman warga sebagai salah satu contohnya. Sepanjang SBY menjadi presiden, konflik agraria yang terjadi sebanyak 1.391 dengan luas lahan 6,5 juta hektar lebih (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014).

Pada masa Presiden Jokowi (2015-2020), Konsorsium Pembaruan Agraria (2021) menyatakan konflik agraria meningkat menjadi 2.291 kasus. Peningkatan konflik ini tidak terlepas dari penanganan agraria era Jokowi ini masih bercorak sama dengan SBY yaitu mengutamakan investasi. Persoalan agraria masih dianggap sebagai persoalan tanah semata, sementara ruang hidup masyarakat masih terabaikan. Apabila SBY mengeluarkan MP3EI, maka pada masa Jokowi melahirkan UU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai *omnibus law* yang isinya sama saja melakukan liberalisasi sumber kekayaan agraria tanah air.

Secara kebijakan pada dasarnya sudah ada untuk dijadikan payung hukum oleh pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. Hanya saja pemerintah dari masa ke masa tidak pernah menjadikan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Kompleksitas reforma ag-

raria yang terdiri dari ruang hidup, pertanian, ekonomi pertanian, kehidupan sosial ekonomi penduduk dan kerusakan alam hanya dijadikan tambal sulam program. Pengelolaan praktis dan populer menjadi cara pemerintah setiap dekade. Era ini memperlihatkan, bahwa fokus atau prioritas mereka bukan mendorong bangsa Indonesia yang agraris produktif, dengan mengelola sumber kekayaan alamnya sendiri, melainkan menggunakan kekuatan modal untuk mengolah lahan dalam skala luas. Hal ini yang menjadi sisi gelap dunia pertanian di Indonesia. Pemerintah sepertinya tidak pernah membahasnya dan menuntaskannya supaya tidak menjadi persoalan yang sama dari generasi ke generasi.

Ambiguitas yang terjadi dalam dunia pertanian Indonesia merupakan sisi gelap pertanian itu sendiri. Sistem pengelolaan pertanian skala luas dengan skala kecil disatukan dalam program yang tambal sulam seolah-olah semua berjalan dengan baik. Target mengejar angka ekonomi makro secara nasional selalu melupakan kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya di pedesaan. Data-data konflik dan luasan lahan yang diperebutkan adalah bukti sisi gelap pertanian skala besar. Alih fungsi lahan terjadi secara masif yang diwarnai konflik agraria, baik sektor perkebunan, industri maupun infrastruktur (Purwanti, 2020).

Berdasarkan kacamata sejarah, agraria Indonesia belum bergerak dari era kolonial, artinya Indonesia tidak mempunyai *role model* untuk diikuti sebagai panduan yang pernah terlaksana. Soekarno hanya melahirkan produk hukum untuk mendukung pembagian tanah melalui program *landreform*. Hukum ini lahir berdasarkan keberhasilan uji coba tanah swap praja di Solo dan Yogyakarta yang dibagikan kepada rakyat. Secara keseluruhan pelaksanaan *landreform* belum pernah terjadi di tanah air, hanya sebagian di wilayah saja (Noer, 2012). Indonesia belum sampai pada tahap penyelesaian penataan ulang, penguasaan dan pemanfaatan tanah pasca kolonial, sudah mendapat masalah politik luar biasa yang menggeser Soekarno dari kekuasaan. Dampaknya pada dunia agraria Indonesia adalah

Orde Baru menghilangkan konsep *small farming* dan menggantinya dengan pengelolaan lahan pertanian skala luas berorientasi modal. Revolusi hijau sebagai andalan Orde Baru tidak memberikan dampak yang baik bagi pertanian Indonesia, baik dari segi produksi maupun nasib para petaninya secara ekonomi. Pada 1984 Indonesia memberikan bantuan kepada negara-negara di Afrika yang melanda kelaparan sebesar 100.000 ton beras, tetapi di sisi lain Indonesia mengalami tingkat kemiskinan 21,2%.

Sebuah ironi yang selalu dibanggakan pada masa Orde Baru, bahkan sampai sekarang politisi ekspatriat Orde Baru sering membanggakan program revolusi hijau yang melahirkan swasembada beras pada masa Soeharto. Persoalan tanah dan perkembangan teknologi yang tidak pernah ingin diselesaikan oleh pemerintahan Indonesia dari masa ke masa menjadikan kian kompleksnya persoalan yang akan kita hadapi mengenai pertanian.

Persoalan kedua pertanian Indonesia adalah tidak ada standarisasi untuk menjadi profesi petani. Standarisasi ini sangat diperlukan untuk mendata jumlah petani produktif, luas lahan dan perekonomian petani serta kontribusi pertanian dalam bidang pertanian dalam skala nasional. Standarisasi dunia pertanian harus melihat dari unsur subjek dan objeknya, artinya subjek adalah petani, harus ditetapkan syarat mutlak untuk menjadi petani. Salah satu kemungkinan yang paling tepat adalah orang-orang yang bersekolah di dunia pertanian baik dalam dunia formal dari tingkat sekolah sampai kuliah atau orang-orang yang sudah bertani sejak muda hanya tidak mendapatkan pendidikan formal tentang pertanian<sup>6</sup>. Selain itu, subjek harus menerima bantuan teknologi, modal dan pasar yang sehat untuk produksi pertanian sehingga petani dapat memulai pertaniannya dengan modern. Sama halnya seperti Jepang yang petaninya sudah memiliki teknologi dan sudah mapan karena hasil panen mampu menutupi biaya produksi. Jika

hasil panen petani di Indonesia dengan posisi lahan minimum 2 hektar dan dikelola secara modern maka dapat dipastikan hasilnya sangat maksimal. Apabila hasil produksi sudah melimpah maka tinggal penetapan harga beli dari petani dan harga jual kepada masyarakat. Dengan demikian produksi petani yang dibeli dengan harga bagus akan meningkatkan daya beli petani sehingga industri pertanian dapat mendongkrak ekonomi nasional. Industri alat berat berupa alat-alat pertanian seperti traktor maupun drone, dapat dibayar oleh petani karena sudah memiliki pendapatan yang pasti dan terukur.

Objek pertanian harus memperhatikan kesuburan tanah, jenis tanaman yang layak ditanam dan manajemen tanam. Ketiga hal ini sangat penting dalam penentuan standarisasi objek pertanian karena jenis tanaman Indonesia beragam dan tidak semua menjadi komoditas utama atau paling dibutuhkan masyarakat atau konsumen. Pengaturan ini akan sangat membantu dalam menjaga kestabilan barang di pasar sehingga harga tetap bisa terjangkau masyarakat.

Tantangan lain di dunia pertanian adalah perkembangan teknologi dan pendidikan formal telah menggerus generasi petani muda. Pertanian di negara-negara sebagai tujuan investasi, seperti Indonesia selalu dipandang rendah karena identik dengan kemiskinan. Masuknya teknologi perangkat lunak merubah cara pandang muda/i pedesaan menjadi ke arah wirasaha yang menjadi salah satu faktor hilangnya *skill* bertani.

Di Indonesia program wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak yang berumur 6-15 tahun, baik di desa maupun kota terlalu *text books* dalam kelas. Di dalam lingkungan desa, kondisi ini menghilangkan sifat praktis pertanian di ladang saat membantu orang tuanya. Perlahan, tapi pasti *skill* pertanian mereka telah tergerus. Pendidikan di desa yang mayoritas bermata pencaharian bertani lebih berpa-

<sup>6</sup> Menurut Guru Besar IPA, Dwi Santoso banyak lulusan pertanian, termasuk IPB yang meninggalkan ladang karena penghidupan petani tidak menjanjikan. Sektor Industri dan jasa jauh lebih menjanjikan sehingga banyak anak muda yang lulusan pertanian tidak tertarik menjadi petani. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang tidak mendukung sektor pertanian (Suryowati, 2017).

tok pada kurikulum daripada kondisi mereka sebagai calon generasi petani. Pemuda yang belajar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di desa pada umumnya akan hijrah ke kota sebagai buruh industri maupun menjadi pekerja informal seperti kuli, penjual warung dan tukang ojek. Hal ini terjadi karena semasa pendidikan mereka tidak pernah bersentuhan lagi dengan pertanian padahal pertanian merupakan lingkungan mereka hidup. Hasilnya generasi petani tinggal yang tua saja di desa (Ambarwati, 2016; Luthfi dan Saluang, 2015).

Di dalam tataran teknis pembangunan pertanian modern dengan kompleksitas yang cukup rumit, mulai dari jaminan penguasaan tanah terhadap *small farming*, pengembangan teknologi, sumbangan terhadap pembangunan ekonomi nasional hingga mental masyarakat, khususnya di pedesaan dan akademik pertanian memang tidak mudah untuk menjalankannya. Hari ini pertanian sebagai zona gelap yang tenggelam dalam kubangan kemiskinan<sup>7</sup>. Untuk itu Indonesia membutuhkan satu agenda politik dengan pemimpin yang mengerti atau paling tidak mau mempelajari kondisi agraria tanah air. Orang tersebut adalah presiden yang dipilih secara demokratis. Presiden menjadi kontrol sekaligus pelaksana reforma agraria dan perkembangan teknologi pertanian. Beban tugas yang sangat besar yaitu membenahi semua masalah agraria dan teknologinya.

Saya ingin mengutip ulasan Haraway (1991) bahwa hubungan sosial dan politik memerlukan satu aktor untuk menjadi kontrol sosial sehingga keseimbangan tetap berlangsung. Di dalam penyelesaian dunia pertanian Indonesia yang sangat kompleks maka diperlukan satu tokoh yang mampu menjalankan penyelesaian konflik agraria yaitu perebutan akses terhadap tanah dan program *small farming* yang modern. Presiden Soekarno dalam kurun waktu enam tahun pasca kemerdekaan Indonesia

(1959-1965) mampu menjadi simbol politik menyelesaikan persoalan jaminan pengelolaan tanah untuk petani kecil<sup>8</sup>. Pasca peristiwa 1 Oktober 1965, kekuasaan Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Agenda penataan ulang penguasaan lahan pasca kolonial, menuju pemilikan tanah untuk petani kecil, dengan konsep *small farming* menjadi sirna. Kehadiran Presiden Soeharto lebih tampak menjaga investasi dengan gaya otoriter. Investasi asing menjadi arus utama karena selama kekuasaannya berbagai sumber kekayaan alam langsung dikuasi oleh Amerika salah satunya *freeport*.

Kehadiran Soeharto dalam kancah politik melahirkan kekacauan yang krusial dalam sejarah agraria dan pertanian Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa pada masa era Orde Baru konsep pertanahan skala besar dijalankan di tengah-tengah pertanian kecil milik warga. Pada era reformasi juga tidak ada perubahan bagi pertanian kecil, nasibnya sama dengan era orde baru.

Ulasan Haraway merupakan suatu yang sangat berlian untuk melihat sifat natural dari sosial makhluk hidup, yaitu mengenai kontrol sosial yang sudah ada sejak zaman dulu mulai dari manusia primitif sampai modern. Hanya saja bedanya dalam era modern masyarakat lebih mengenal hukum tertulis yang dijalankan oleh lembaga dan di kepalai oleh seorang individu. Kontrol sosial ini yang tidak dimiliki secara politik oleh Indonesia dalam mendorong terlaksananya reforma agraria dan pengembangan teknologi pertanian. Konflik-konflik agraria semakin meningkat karena masuknya negara-negara pemodal untuk menguasai sumber agraria. Untuk sekarang negara pemodal bukan hanya dari barat saja, sudah termasuk China, Korea Selatan, Timur Tengah bahkan Eropa Timur seperti Rusia juga sudah menguasai kekayaan agraria kita.

Pada masa sekarang Indonesia membutuhkan

<sup>7</sup> Berdasarkan data BPS 2021, sektor pertanian adalah penyumbang terbesar angka kemiskinan, mencapai 51,33% dari total jumlah rumah tangga miskin.

<sup>8</sup> Sepanjang perjalanan Indonesia merdeka era hanya era Pemerintahan Soekarno yang sangat memprioritaskan *landreform* dan menjadikan konsep pertanian skala kecil yang efisien melalui UPPA No.5/1960 dan turunannya UU No.56/PRP/1961 tentang Luas Lahan Pertanian.

sosok kepemimpinan yang kuat untuk meredam laju investasi yang melahap lahan luas. Di sisi lain, kepentingan para petani kecil harus menjadi prioritas sehingga konflik-konflik agraria tidak terjadi lagi. Selain membangun teknologi pertanian tugas pemimpin yang memimpin Indonesia adalah memberikan jaminan kepada petani hak atas tanah sesuai dengan UU No.56/PRP/1961 tentang *landreform* atau luas lahan pertanian. Bila inisiatif dari atas tidak ada maka harus ada dorongan dari akar rumput untuk mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria (Wiradi, 2009).

Pandangan lain yang menarik dari Haraway adalah mengenai *cyborg* sebagai sebuah hubungan antara makhluk hidup dan mesin, realitas sosial yang terbentuk melalui hubungan sosial dan konstruksi politik secara fiksi. *Cyborg* mencerminkan kesadaran imajinatif mengenai kondisi sosial yang terjadi seperti penindasan, ketakutan, dan budaya sehingga kita bisa melihat transformasi dari tradisional ke dalam kapitalis (Haraway, 1991). Di dalam mengkontekstkan pemikiran Haraway mengenai *Cyborg* kedalam pertanian Indonesia kita bisa menariknya melalui hubungan kerja sama. Kerja sama dalam dunia pertanian dari historis Indonesia adalah gotong royong dan hampir semua masyarakat pertanian memiliki sistem yang sama.

Setiap anggota keluarga petani akan membantu petani lainnya saat panen maupun persiapan lahan untuk menanam pasca panen. Sebagai balasannya pemilik lahan yang dibantu akan menyediakan hidangan makan malam atau makan siang. Selanjutnya petani yang dibantu akan berhutang satu bantuan terhadap rekannya petani yang membantunya. di sisi lain, setiap petani yang dibantu selalu menyediakan jamuan makan untuk petani lainnya yang membantunya. Siklus ini terus bergulir dari generasi ke generasi hingga sekarang tenaga kerja membantu lahan pertanian yang sedang panen telah berubah menjadi materi, biasanya berbentuk uang. Perubahan nilai tukar tenaga kerja menjadi sebuah materi, seperti uang telah menghapus tanggung jawab moral saling tolong menolong dalam lahan pertanian. Setiap

petani yang sudah membayar tenaga kerja petani lainnya pada saat membantu di lahannya, maka dia tidak berkewajiban lagi untuk membantu rekannya di kemudian hari.

Hubungan antara sosial ini mengalami modifikasi karena masuknya sentuhan teknologi modern. Sebagai contoh bagi petani yang mempunyai luas lahan di atas 1 hektar dan menggunakan alat pertanian yang sederhana seperti arit atau cangkul maka sudah barang tentu dia membutuhkan tenaga kerja dari luar keluarganya. Apabila dulu sifatnya gotong royong kemudian berubah menjadi tenaga kerja dibayar dalam bentuk uang, maka sekarang digantikan teknologi seperti traktor. Traktor biasanya dipakai bergiliran karena traktor menjadi aset desa tetapi dalam situasi politik tertentu membuat pemakaian aset desa ini tidak bebas, tergantung elit desa. Akhirnya melahirkan satu sistem sewa dari petani yang lebih kaya dan mempunyai traktor terhadap petani yang tidak mempunyai traktor. Perkembangan teknologi yang tidak merata disetiap petani menjadikan siklus ekonomi tidak seimbang, artinya petani tidak mempunyai alat seperti traktor harus mengeluarkan biaya sewa yang hanya menambah kekayaan bagi petani mempunyai alat traktor (Schrauwers, 1998).

Berdasarkan dua ilustrasi di atas dapat kita lihat bahwa transformasi secara proses sejarah telah melahirkan satu budaya baru yaitu berubahnya nilai gotong royong menjadi tenaga kerja yang dibayar dalam bentuk materi. Petani yang tadinya bergotong royong dalam mengelola panen dan persiapan lahan untuk menanam berubah menjadi materil. Sistem kekerabatan yang di dalamnya ada tanggung jawab moral berubah menjadi materi, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun teknologi seperti traktor. Ada dua sisi yang bisa kita cermati, pertama berubahnya gotong royong menjadi ada tenaga kerja yang dibayar karena meledaknya buruh tani. Meledaknya buruh tani tidak terlepas dari sempitnya lahan untuk petani kecil atau bahkan mereka sudah tidak punya tanah lagi sehingga menjadi buruh tani. Kedua adanya sistem politik yang menye-

babkan petani menyewa traktor dari perangkat desa.

Apabila kita meminjam kembali pemikiran Haraway mengenai *cyborg*, yaitu fiksi dan imajinatif, maka kita akan bisa membangun sosio-teknologi pertanian. Pada konteks membangun teknologi pertanian domestik maka sangat dibutuhkan imajinasi untuk mendesain dan menciptakan standar yang tepat bagi pedesaan. Tanpa imajinasi maka desain dan standar untuk membangun pertanian modern hanya sebuah angan-angan karena pada akhirnya akan mengimpor teknologi dari luar. Seperti yang sudah disinggung pada tulisan sebelumnya, bahwa teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Untuk itu teknologi pertanian harus mampu mendongkrak perekonomian nasional dan produksinya harus bermanfaat bagi masyarakat di luar dunia pertanian. Dengan demikian sosio-teknologi pertanian sudah terbentuk. Dengan kata lain sosio-teknologi pertanian, melahirkan teknologi domestik di bidang pertanian guna memberikan manfaat kepada produksi dan pendapatan petani, termasuk perekonomian nasional (perputaran ekonomi alat pertanian di petani dan produksi pertanian) serta berdampak bagi masyarakat luas di luar pertanian, paling tidak hasil produksi pertanian yang sehat dan terjangkau (harga stabil).

Sosio-teknologi pertanian hanya bisa dicapai jika persoalan luas lahan untuk petani sudah selesai terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa dan bagaimana memulainya? Untuk menjawab pertanyaan ini maka ada dua cara pertama adalah inisiatif dari pemerintah yang menggunakan semua elemen birokrasinya dan membangun perusahaan industri pertanian yang mencakup alat dan olahan produksi pertanian, perusahaan ini berupa milik negara. Dari sini akan banyak program yang dikembangkan, hanya saja ini harus dijalankan secara konsisten, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Seperti sebelumnya, setiap ganti presiden maka ganti program kerja pertanian. Kedua bisa melalui inisiatif masyarakat kerjasama antara lembaga sipil, seperti partai politik, organisasi masyarakat atau komunitas

yang bekerjasama dengan perusahaan untuk mengembangkan pertanian. Semua bisa berjalan sesuai dengan pilihan yang diambil, tetapi pertanian tidak akan bergerak maju jika tidak ada pilihan yang diambil. Hanya ada sistem tambal sulam *small farming* di tengah-tengah pertanian skala besar. Sosio-teknologi pertanian harus bisa merubah citra petani yang identik dengan kemiskinan, ketinggalan zaman dan tidak menarik. Sosio-teknologi harus bisa merubah mental masyarakat melihat pertanian merupakan satu profesi bergengsi dan menjadi jantung kehidupan negara.

### Simpulan

Kompleksitas pertanian bukan hanya menyoal teknologi tetapi adanya persoalan luas lahan pertanian sebagai jaminan kepada petani untuk berproduksi. Tidak terjaminnya lahan yang memadai membuat menjadikan petani kita berkategori gurem dan buruh tani. Jika lahan sudah terjamin maka sosio-teknologi pertanian harus dapat mengangkat harkat dan martabat petani sehingga pikiran bahwa menjadi petani merupakan pekerjaan yang tidak menarik karena identik dengan kemiskinan dan ketinggalan zaman sirna di masyarakat luas. Sosio teknologi pertanian akan menyelesaikan kegamangan (*stuck*) dunia pertanian secara domestik dan mengejar kemajuan dunia luar dalam bidang pertanian, bukan hanya memberikan pendapatan yang memadai bagi petani, tetapi pergerakan ekonomi nasional.

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka Indonesia hari ini membutuhkan satu karakter yang kuat untuk meredam laju investasi dan memprioritaskan program *small farming*. Tanpa ada tokoh yang kuat untuk mendobrak perubahan agraria dan teknologi pertanian maka kekacauan agraria akan terus terjadi. Liberalisasi sumber agraria yang terjadi akan melahirkan konflik-konflik agraria yang merampas ruang hidup masyarakat. Bila tidak ada inisiatif dari elit pemerintah maka masyarakat harus mendorongnya dari bawah, artinya desakan untuk menjalankan reforma agraria sejati dan mengembangkan teknologi pertanian lahir dari masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ambarwati, A., Sadoko, I., Chazali, C. (2016). *Pemuda dan Pertanian di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.akatiga.org/wp-content/uploads/2018/06/Pemuda-dan-Pertanian-di-Indonesia.pdf>
- Danari, S. R. (2016). Analisis Sistem Jual Beli Ijon pada Komoditas Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 2.
- Febrianti, V. P., Permata, T. A., Humairoh, M., Putri, O. M., Amelia, L., Fatimah, S., & Khas-tini, R. O. (2021). Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi Padi. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), 54–60. <https://doi.org/10.31970/pangan.v6i2.50>
- Gandi, G. G., Mustofa, M. S., & Luthfi, A. (2017). Jaringan Sosial Petani dalam Sistem Ijon Pada Pertanian di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang. *Solidarity*, 6(1), 86–95.
- Ginting, S. B., Hum, M., & Lidjon, W. (2019). Batasan Tanah Negara Dalam Landreform. *Jurnal Law Pro Justitia*, IV(2), 88–106.
- Habtewold, T. M. (2021). Impact of climate-smart agricultural technology on multidimensional poverty in rural Ethiopia. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1021–1041. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(21\)63637-7](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(21)63637-7)
- Haraway, D. J. (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. *Contemporary Sociology*, 21(3). <https://doi.org/10.2307/2076334>
- Hendriyanto, K. (2020). Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 136–168. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1779>
- Jasanoff, S. (2006). Technology as a Site and Object of Politics. *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0040>
- Latifa, N. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1).
- Luthfi, A. N., & Saluang, S. (2015). Masa Depan Anak Muda Pertanian Di Tengah Liberalisasi Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.40>
- Maftuchin, A. S. (2017). Tuan Tanah dan Lurah : Relasi Politik Lokal Patron-Client di Desa Sukorejo Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang dalam Kurun Waktu 2007-2013. *Umbara*, 1(2), 138–149. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.9983>
- Morton, T. (2016). *Dark Ecology*. <https://doi.org/10.7312/mort17752>
- Noer, R. F. (2012). *Landreform dari masa ke masa. tanah iar beta dan konsorsium pembaruan agraria*. <https://doi.org/10.4324/9781315745022-16>
- Pradhani, S. I. (2019). Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>
- Purwanti, T. (2020). Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Pada Kehidupan Ekonomi Petani. *Umbara*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.21696>
- Rusdiyana, E., Setyowati, R., & Purnomo, J. (2019). Transformasi Perlawanan Petani dalam Menghadapi Tengkulak (Studi Kasus Petani Cabai Lahan Pasir Pantai di Kecamatan Panjatan , Kulon Progo). *Jurnal Fakultas Pertanian UNS*, 3(1), 23–28. <https://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/view/1448>
- Saputra, Y. H. (2018). Kasus Pertanian Wilayah Pinggiran Kota Bandung. *Sepa*, 14(2), 146–158.
- Schrauwers, A. (1998). “Let’s party”: state intervention, discursive traditionalism and the labour process of highland rice cultivators in central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 25(3), 112–130. <https://doi.org/10.1080/03066159808438677>
- Sirnawati, E., & Syahyuti. (2018). Evolusi Inovasi Pembangunan Pertanian Di Badan Litbang Pertanian : Dari Transfer Teknologi Ke Sistem Inovasi. *Badan Litbang Pertanian*, 36(1), 13–22.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2016). Luas La-

han Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30>

Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir (edisi revisi)*. Dikutip dari <http://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/GWR.-2009.-Reforma-Agraria-Perjalanan-belum-Berakhir.pdf>